KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL KEKAYAAN NEGARA
SEKRETARIAT DIREKTORAT JENDERAL

GEDUNG SYAFRUDIN PRAWIRANEGARA II LANTAI 10
JALAN LAPANGAN BANTENG TIMUR NO.2-4 JAKARTA 10710 KOTAK POS 3169
TELEPON (021) 3504452; FAKSIMILE (021) 3847742; SITUS www.djkn.kemenkeu.go.id

NOTA DINAS
Nomor ND- 93 /KN.1/2019

Kepada : Para kepala Kantor Wilayah di lingkup DJKN
Dari : Sekretaris Ditjen Kekayaan Negara
Lampiran : 1 (satu) berkas
Hal : Kegiatan Lomba Implementasi Pengarusutamaan Gender di Lingkungan DJKN Tahun 2019
Tanggal : 09 Januari 2019

Sesuai dengan rencana kerja Tim Pengarusutamaan Gender (PUG) DJKN dan upaya mewujudkan keadilan dan kesetaraan gender atas kebijakan, program kegiatan di lingkungan DJKN, bersama ini kami sampaikan hal-hal sebagai berikut:

1. Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2000 tentang Pengarusutamaan Gender dalam Pembangunan Nasional disebutkan bahwa Pengarusutamaan Gender merupakan strategi pembangunan untuk mencapai keadilan dan kesetaraan gender melalui kebijakan dan program yang memperhatikan pengalaman, aspirasi, kebutuhan, dan permasalahan perempuan dan laki-laki ke dalam proses perencanaan, pelaksanaan, pemantauan, dan evaluasi terhadap seluruh aspek kehidupan dan pembangunan.
2. Direktorat Jenderal Kekayaan Negara mempunyai komitmen yang tinggi untuk berperan aktif dalam implementasi PUG baik di internal maupun eksternal DJKN, hal ini dapat terlihat atas penghargaan yang diterima Kantor Pusat DJKN tahun 2018 atas upayanya dalam implementasi PUG.
3. Selanjutnya, dalam upaya mengefisienkan, mengefektifkan dan meningkatkan implementasi PUG di lingkup DJKN, pada tahun 2019 akan dilaksanakan evaluasi yang dikemas dalam bentuk lomba implementasi pengarusutaman gender atar unit vertikal lingkup DJKN.
4. Kriteria yang dinilai dalam lomba tersebut meliputi:
   a. Pemahaman tentang konsep gender dan PUG;
   b. Kebijakan yang responsif gender, antara lain:
      1) Komitmen dari pimpinan satuan kerja terhadap pelaksanaan PUG antara lain pembentukan Pokja PUG.
      2) Sumber-sumber daya yang memadai dalam rangka mendukung pelaksanaan PUG berupa ketersediaan SDM yang memahami tentang pelaksanaan PUG.
      3) Data terpilah.
   c. Sarana dan prasarana fisik gedung perkantoran, dapat berupa: ruang laktasi, toilet, lift, ruang ramah anak dan sebagainya yang responsif gender.
5. Penilaian lomba dilaksanakan bulan Maret 2019, diharapkan unit vertikal dapat menunjuk satu satker vertikal diwilayah kerja Saudara yang belum pernah ditunjuk sebagai peserta lomba dan dapat disampaikan ke Sekretariat Ditjen Kekayaan Negara paling lambat tanggal 18 Januari 2019 melalui alamat email PUGDJKN@kemenkeu.go.id

6. Sebagai bentuk apresiasi terhadap kegiatan ini, akan diberikan penghargaan kepada juara lomba implementasi PUG dan akan mewakili DJKN sebagai peserta lomba implementasi PUG lingkup Kementerian Keuangan Tahun 2019.

Atas perhatian dan kerjasamanya, diucapkan terima kasih.

Dodi Iskandar

Tembusan :
1. Direktur Jenderal Kekayaan Negara;
2. Kepala Biro Perencanaan dan Keuangan, Setjen Kementerian Keuangan.

KEMENTERIAN KEUANGAN

DIREKTORAT JENDERAL KEKAYAAN NEGARA

Panduan Peserta

Lomba Implementasi PUG

Direktorat Jenderal Kekayaan Negara

Tahun 2019

A. LATAR BELAKANG

Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2000 tentang Pengarusutamaan Gender Dalam Pembangunan Nasional menginstruksikan pemerintah pusat maupun pemerintah daerah untuk melaksanakan pengarusutamaan gender guna terselenggaranya perencanaan, penyusunan, pelaksanaan, pemantauan dan evaluasi atas kebijakan dan program pembangunan nasional.

Surat Edaran Bersama Bappenas, Kementerian Keuangan, Kementerian Dalam Negeri, dan Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak nomor SE-33/MK.02/2012 tentang Strategi Nasional Percepatan Pengarustamaan Gender melalui Perencanaan dan Penganggaran yang Responsif Gender.

Surat Edaran Direktur Jenderal Kekayaan Negara Nomor SE-5/KN.2018 tentang Penguatan Implementasi Pengarustamaan Gender di Lingkungan Direktorat Jenderal Kekayaan Negara guna untuk menguatkan pemahaman dan mendorong PUG menjadi salah satu perspektif utama diseluruh bidang pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Direktorat Jenderal Kekayaan Negara.

PUG adalah strategi pembangunan untuk mencapai keadilan dan kesetaraan gender melalui kebijakan dan program yang memperhatikan pengalaman, aspirasi, kebutuhan dan permasalahan perempuan, laki-laki, anak-anak, lansia dan difabel ke dalam proses perencanaan, pelaksanaan, pemantauan, dan evaluasi terhadap seluruh aspek kehidupan dan pembangunan. Dengan menyelenggarakan PUG, maka dapat diindentifikasi apakah perempuan dan laki-laki memperoleh akses yang sama terhadap sumber daya pembangunan, memiliki peluang berpartisipasi yang sama dalam proses pembangunan, terutama dalam proses pengambil keputusan, memiliki kontrol yang sama dalam pembangunan dan memperoleh manfaat yang sama atas hasil pembangunan. Tujuan PUG adalah mempersempit bahkan meniadakan kesenjangan gender yang mengantarkan pada keadilan dan kesetaraan gender, melalui PUG diharapkan transparansi dan akuntabilitas pemerintah dalam pembangunan yang berperspektif gender terhadap rakyatnya akan lebih meningkat.

Direktorat Jenderal Kekayaan Negara mempunyai komitmen yang kuat untuk berperan aktif dalam pelaksanaan PUG. Sebagai bentuk wujud komitmen Direktorat Jenderal Kekayaan Negara dalam melaksanakan PUG, telah dilakukan berbagai upaya dalam rangka optimalisasi pelaksanaan PUG di lingkungan Direktorat Jenderal Kekayaan Negara diantaranya dengan melakukan sosialisasi, advokasi, bimbingan, penyediaan buku saku PUG, modul pedoman penguatan implementasi PUG, dan

melakukan *benchmarking* ke UNESCO *Office* Jakarta.

Implementasi pelaksanakan PUG di Direktorat Jenderal Kekayaan Negara antara lain:

1. **Implementasi dari sisi kebijakan:**

    a. Surat Edaran Direktur Jenderal Kekayaan Negara Nomor SE-5/KN/2018 tanggal 28 September 2018 tentang Penguatan Implementasi Pengarusutamaan Gender di Lingkungan Direktorat Jenderal Kekayaan Negara.

    b. Penerbitan surat yang ditujukan untuk kantor wilayah di seluruh Indonesia agar dapat mengimplementasikan PUG di kantornya masing-masing, memberikan dukungan atas implementasi PUG di daerah, menyusun data terpilah, dan menjadi koordinator PUG di daerah.

    c. Pembayaran gaji dan tunjangan kinerja dapat berada pada bank yang berbeda sesuai kebutuhan pegawai. Rekening dapat dibuka pada bank mana saja sesuai dengan aspirasi para pegawai.

    d. Program Sistem Informasi Preferensi Mutasi (Siprita) yang dapat mengakomodir dan mempertimbangkan mutasi pegawai atas unit kerja yang diinginkan. Dengan adanya Siprita, dapat menampung seluruh kesah pegawai sehingga kebijakan dapat melihat lebih dalam kebutuhan pegawai yang selama ini menjadi informasi pribadi pegawai.

    e. Penyempurnaan Aplikasi *E-Auction* berguna untuk memudahkan peserta lelang baik perempuan maupun laki-laki untuk berpartisipasi mengikuti lelang. Dengan adanya penyempurnaan ini, ditambakan fitur-fitur seperti tanggal lahir, jenis kelamin, dan pekerjaan yang mengakomodir kebijakan yang responsif gender.

    f. Penyempurnaan Aplikasi SIMAN, sehingga mempermudah operator aplikasi SIMAK BMN yang sebagian besar adalah pegawai wanita berusia di atas 40 tahun dengan waktu pengerjaan yang lama. Dengan memasukkan data terpilah pada aplikasi SIMAN, dapat memudahkan pengguna untuk mengaksesnya.

    g. Pemenuhan kebutuhan Rumah Negara untuk menunjang tugas pegawai DJKN yang responsif gender.

2. **Sarana dan Prasarana:**

    a. Penyediaan 2 (dua) buah ruang laktasi yang nyaman dan aman, serta dilengkapi dengan tempat penyimpanan ASIP agar selama di kantor tetap focus dan produktif.

    b. Penyediaan Parkir Prioritas.

    c. Penyediaan ruangan *playground.*

    d. Buku-buku PUG koleksi perpustakaan DJKN yang berguna untuk menambah wawasan pegawai DJKN.

    e. Penyediaan ruang sinergi/ *Co-Working Space*.

    f. Pojok kacamata baca dan pojok *charger.*

    g. Ramp dan pegangan untuk difabel dan lansia.

    h. Lift dengan pegangan bagi pengguna disabilitas.

    i. Pegangan di toilet laki-laki dan perempuan.

    j. Kotak pembalut baru dan bekas di toilet perempuan.

B. MAKSUD DAN TUJUAN

Maksud:

Mengadakan lomba Implementasi PUG lingkup kantor vertikal Direktorat Jenderal Kekayaan Negara dalam rangka evaluasi pelaksanaan PUG di lingkungan Direktorat Jenderal Kekayaan Negara.

Tujuan:

1. Memastikan seluruh kebijakan, program dan kegiatan DJKN telah adil dan setara bagi perempuan dan laki-laki
2. Memastikan adanya keberlanjutan, pelestarian dan pengembangan kualitas penyelenggara PUG di DJKN
3. Memastikan bahwa seluruh jajaran DJKN memahami konsep, prinsip dan strategi PUG dalam penyelenggaraan pembangunan yang menjadi tugas, fungsi dan kewenangan DJKN
4. Menghimpun data, informasi, dan mengetahui perkembangan serta kendala dalam pelaksanaan PUG di lingkungan Direktorat Jenderal Kekayaan Negara
5. Memberikan rekomendasi untuk perbaikan pelaksanaan PUG di lingkungan Direktorat Jenderal Kekayaan Negara

C.HASIL YANG DIHARAPKAN

1. Terwujudnya keadilan dan kesetaraan atas kebijakan, program kegiatan di lingkungan Direktorat Jenderal Kekayaan Negara.
2. Meningkatnya kebijakan, program, dan kegiatan responsif gender di lingkungan Direktorat Jenderal Kekayaan Negara.

D. JADWAL PELAKSANAAN

	Kegiatan	Jan	Feb	Mar
1	**Surat pemberitahuan lomba kepada unit eselon II**			
2	**Rapat Koordinasi/ *Video Conference* dengan unit vertikal dalam rangka pemaparan dan diskusi lomba.**			
3	**Surat Pemberitahuan tentang petunjuk teknis lomba**			
4	**Penilaian oleh tim penilai dan dewan juri**			
5	**Penetapan pemenang dan penyerahan penghargaan**			

E. KRITERIA PENILAIAN

1. **Pemahaman Tentang PUG**

   Pemahaman tersebut meliputi:

   - Konsep Gender
   - Pengarustamaan Gender (PUG)
   - Anggaran Responsif Gender (ARG)

   Bobot Penilaian : **35%**

2. **Kebijakan Responsif Gender**

   Kebijakan tersebut meliputi:

   - Komitmen pimpinan dalam implementasi PUG, dapat berupa penetapan SK Tim PUG, Program Responsif Gender, arahan dan lain sebagainya.

   Bobot Penilaian : **35%**

3. **Prasarana Fisik Gedung**

   Penerapan strategi PUG dalam pelaksanaan pembangunan prasarana fisik Gedung perkantoran yang telah memperhatikan kebutuhan perempuan, laki-laki, dan orang-orang dengan kebutuhan khusus.

   Contoh:

   - Penyediaan kamar mandi terpisah bagi pegawai laki-laki maupun perempuan.
   - Penyediaan ruang Laktasi bagi pegawai maupun *stakeholders.*
   - Tangga responsif gender.

- Penyediaan tempat penitipan anak dan *playground* di lingkungan Direktorat Jenderal Kekayaan Negara.

Bobot Penilaian : **30%**

F. ALAT PENILAIAN LOMBA

1. Kegiatan ini dilakukan dengan menggunakan kombinasi pendekatan kuantitatif dan kualitatif.
2. Data dan informasi yang diperlukan dikumpulkan melalui penyebaran kuesioner, interview, serta tinjauan lapangan.

G. TIM PENILAI DAN DEWAN JURI

1. Pakar gender.
2. Pejabat Sekretariat Jenderal.
3. Pejabat di lingkungan Direktorat Jenderal Kekayaan Negara.

H. PENGUMUMAN PEMENANG

Pemenang Lomba Implementasi Pengarusutamaan Gender akan diumumkan pada bulan Maret Tahun 2019 untuk kemudian akan mewakili DJKN dalam Lomba Implementasi PUG antar unit Vertikal di lingkungan Kementerian Keuangan tahun 2019.

FORMULIR EVALUASI
PELAKSANAAN IMPLEMENTASI PENGARUSUTAMAAN GENDER
SATKER VERTIKAL LINGKUP KEMENTERIAN KEUANGAN
TAHUN 2019

IDENTITAS SATKER

1.	Nama Satker	:	
2.	Nama Pimpinan Satker	:	
3.	*Contact Person*	:	L / P
4.	Alamat	:	
5.	Telepon/fax	:	
6.	No HP dan Email *Contact Person*	:	

FORMULIR EVALUASI
PELAKSANAAN IMPLEMENTASI PENGARUSUTAMAAN GENDER
SATKER VERTIKAL LINGKUP KEMENTERIAN KEUANGAN
TAHUN 2019

A. DATA UMUM

1. Jumlah pegawai di Satker Saudara berdasarkan jenis kelamin dan jabatan

JABATAN	L	P	JUMLAH
Eselon I	...	...	...
Eselon II	...	...	...
Eselon III	...	...	...
Eselon IV	...	...	...
Pelaksana	...	...	...
Fungsional, dll	...	...	...

2. Jumlah pegawai di Satker Saudara berdasarkan jenis kelamin dan tingkat pendidikan

TINGKAT PENDIDIKAN	L	P	JUMLAH
Pascasarjana (S2/S3)	...	...	...
Sarjana (S1/DIV)	...	...	...
Diploma (DIII/DII/DI)	...	...	...
SMA	...	...	...
< SMA	...	...	...

3. Berapa jumlah SDM di unit Saudara yang telah mengikuti sosialisasi/seminar/*workshop*/ bimbingan teknis PUG?

JABATAN	L	P	JUMLAH
Eselon III	...	...	...
Eselon IV	...	...	...
Pelaksana	...	...	...
Fungsional, dll	...	...	...

B. SARANA DAN PRASARANA FISIK

Ketersediaan sarana dan prasarana fisik gedung perkantoran di Unit Saudara yang telah mengintegrasikan perspektif gender.

1. Ketersediaan ruang laktasi/menyusui bagi pegawai dan *stakeholder* perempuan ☐ Ada ☐ Tidak
   Jika Ada, berapa jumlahnya?.....
2. Ketersediaan toilet yang terpisah untuk pegawai laki-laki dan perempuan serta *stakeholder* ☐ Ada ☐ Tidak
   Jika Ada, berapa jumlahnya?.....
3. Anak tangga yang ramah bagi laki-laki dan perempuan ☐ Ada ☐ Tidak
4. *Lift* yang ramah bagi *disable person* ☐ Ada ☐ Tidak
5. Penyediaan Ruang Ramah Anak ☐ Ada ☐ Tidak
6. Ketersediaan media Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) tentang PUG (misal: *poster*, *foto*, *leaflet*, *booklet*, atau *standing banner*) ☐ Ada ☐ Tidak
7. Sarana dan prasarana fisik lainnya yang terkait dengan implementasi PUG, mohon disebutkan

_____
_____
_____
_____
_____

C. KEBIJAKAN RESPONSIF GENDER

1. Apakah ada wujud komitmen Saudara dalam mendukung implementasi PUG di Satker Saudara (SE, ND, SK, dsb)? (Jika ada mohon disebutkan dan disiapkan buktinya).

_____
_____
_____
_____
_____

2. Apakah di Unit Saudara telah mengintegrasikan perspektif gender dalam perencanaan maupun penganggarannya? Jika Ya, sebutkan pada output apa saja beserta jumlah anggarannya.

_____
_____
_____
_____
_____

3. Apakah di Unit Saudara terdapat tim/kelompok kerja Pengarusutamaan Gender? Jika Ya, apakah kelompok kerja PUG tersebut mempunyai rencana kerja?

4. Berapa kali pertemuan tim/kelompok kerja Pengarusutamaan Gender dalam setahun?

D. DAMPAK RESPONSIF GENDER

Apakah dengan adanya pengarusutamaan gender telah memberikan dampak pada unit Saudara? Mohon berikan penjelasan.

E. LAMPIRAN DOKUMENTASI

(Dokumentasi berupa foto sarana dan prasarana, foto kegiatan, dan program responsif gender)